

PEMBERDAYAAN HUBUNGAN MASYARAKAT APARATUR PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Dafrizal Samsudin¹, Hamsal Kamar², Al Sukri³

^{1,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau,
Jalan Kaharuddin Nst No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau,
Jalan Kaharuddin Nst No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

¹e-mail: dafrizal@comm.uir.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi khususnya media sosial berdampak kepada budaya komunikasi hubungan masyarakat pemerintah. Tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah upaya peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi hubungan masyarakat (humas) pemerintahan berbasis teknologi komunikasi bagi aparat pemerintah kelurahan dan kepenghuluan di kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan PKM bertempat di Aula Kantor Camat Rantau Kopar dengan peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari lurah, datuk penghulu, sekretaris kelurahan, sekretaris kepenghuluan, para kasi, kepala urusan dan staf berasal dari unsur aparat pemerintahan kelurahan Rantau Kopar, kelurahan Sungai Rantau, kepenghuluan Bagan Cempedak dan Kepenghuluan Sekapas. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan metode penyuluhan berupa penyampaian materi oleh narasumber dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab secara interaktif dengan para peserta PKM. Hasil kegiatan PKM yaitu adanya peningkatan kualitas pemahaman dan pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis media sosial oleh aparat pemerintahan kelurahan dan kepenghuluan dalam hal komunikasi hubungan masyarakat bagi meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

Kata Kunci: hubungan masyarakat, pemerintahan, teknologi komunikasi

Abstract

The development of communication technology, especially social media, has an impact on the government's public relations communication culture. The aim of the Community Service Program (PKM) is to increase human resources of communication technology-based government public relations (PR) for village government officials of the Rantau Kopar sub-district, Rokan Hilir Regency. The PKM activity took place in the hall of the Rantau Kopar sub-district office with 25 participants consisting of the lurah, affairs secretaries, and heads of affairs and staff of the village government apparatus of Rantau Kopar, Sungai Rantau, Bagan Cempedak and Sekapas. PKM activities using the extension method such as delivering material by speakers, and question-and-answer session with PKM participants. The result of PKM activities increase the quality of understanding and utilization of communication technology based on social media by village and kepenghuluan government officials in terms of public relations communication to improve the quality of community services.

Keywords: public relations, communications, communication technology

PENDAHULUAN

Secara sejarah, istilah hubungan masyarakat (*public relation*) dikenali muncul ke publik sekitar tahun 1807 di Amerika terkait dengan pidato Presiden Amerika Thomas Jefferson yang mengganti istilah *state of though* dengan *public relation* (Khotimah, 2021). Selanjutnya menurut Khotimah (2021) dalam konteks pemerintah merupakan sebuah strategi pemerintah untuk meningkatkan ruang dialog dengan warga tentang kebijakan. Komunikasi humas pemerintah adalah salah satu faktor penting bagi memastikan kebijakan program pemerintah dapat diterima dengan baik oleh warga masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, maka dalam menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Pemantapan komunikasi publik dalam organisasi pemerintahan juga menjadi keharusan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk itu, dalam konteks pemerintahan tingkat desa, setiap perangkat desa berperan sebagai humas yang menyebarkan informasi dengan jelas kepada warga masyarakat desa (Afnan, 2019). Selain itu, pemerintah tidak hanya merancang strategi komunikasi yang efektif, tetapi juga memastikan akuntabilitas informasi yang disampaikan ke publik untuk memastikan tercapai visi misi pemerintah dalam layanan publik (Lee et.al., 2012).

Dalam pada itu, perkembangan praktik kehumasan turut dipengaruhi oleh perkembangan revolusi industri sejak era 1.0 hingga 4.0 saat ini yang dicirikan dengan perkembangan teknologi komunikasi digital (Simatupang, 2020). Dalam pemerintahan, pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi suatu keniscayaan bagi aparatur pemerintah untuk memanfaatkannya guna memperlancar pelayanan publik. Hal ini telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Wujudnya platform media sosial berkontribusi terhadap kinerja humas pemerintahan dalam menjalankan fungsi layanan informasi bagi masyarakat.

Tinjauan terhadap beberapa hasil kajian pengabdian masyarakat terdahulu antara lain didapati pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah di lingkungan kabupaten/kota di Jawa Barat telah menggunakan media sosial dalam memenuhi kebutuhan informasi publik dan sebagai strategi *branding* pemerintah untuk mengikatkan hubungan pemerintah dengan warga (Permasih, et.al. 2018; Nugraha, et.al. 2020). Di Kabupaten Asahan, pemerintah menggunakan aplikasi media sosial untuk menyokong kemajuan pembangunan daerah (Syafwan, et.al. 2021). Demikian juga dengan pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan saluran media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah (Cahyani, 2020). Bahkan Maulvi, et al. (2023) mendapati bahwa media sosial telah digunakan instansi pemerintah dalam memudahkan layanan publik seperti kecepatan penyampaian informasi, komunikasi dua arah dan sebagai sarana *networking* dengan instansi lain.

Bagaimanapun juga, setiap daerah di Indonesia menghadapi masalah yang berbeda dalam menjalankan fungsi komunikasi humas pemerintahan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh salah satunya faktor ketersediaan sumber daya manusia, termasuk di daerah Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kecamatan Rantau Kopar merupakan mitra pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

Rantau Kopar adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir, hasil pemekaran dari Kecamatan Tanah Putih. Kecamatan Rantau Kopar terdiri dari empat kepenghuluan yaitu Kepenghuluan Sekapas, Bagan Cempedak, Rantau Kopar, dan Sungai Rangau. Secara geografis, kecamatan Rantau Kopar merupakan sebuah wilayah yang berada di daerah aliran sungai (DAS) Sungai Rokan. Sebagian besar penduduk menjadikan profesi sebagai nelayan sebagai

sumber ekonomi utama yang dihasilkan dari Sungai Rokan. Sebaran Penduduk di Kecamatan Rantau Kopar dapat lihat pada Tabel 1 (BPS Kecamatan Rantau Kopar Dalam Angka 2021).

Tabel 1 Sebaran Penduduk di Kecamatan Rantau Kopar

Kelurahan/ Kepenghuluan	Jumlah Keluarga	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekapas	228	387	389	776
Bagan Cempedak	414	891	1 309	2 200
Rantau Kopar	766	1 307	1 325	2 632
Sungai Rangau	475	895	852	1 747
Jumlah	1 883	3 480	3 875	7 355

Setiap kelurahan/ kepenghuluan di Kecamatan Rantau Kopar telah memiliki kelengkapan pemerintahan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPK dan ketua LPM. Seperti terlihat pada Tabel 2 (BPS Kecamatan Rantau Kopar Dalam Angka 2021).

Tabel 2 Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Rantau Kopar

Kelurahan/ Kepenghuluan	Kepala Desa		Sekretaris Desa		Ketua BPK		Ketua LPM	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Rantau Kopar	√	-	√	-	-	-	√	-
Sungai Rangau	√	-	√	-	-	-	√	-
Bagan Cempedak	√	-	√	-	√	-	√	-
Sekapas	√	-	√	-	√	-	√	-

Keterangan L= Laki-laki P=Perempuan

Selanjutnya, terdapat isu permasalahan terkait dengan peran komunikasi humas pemerintahan di lingkungan Kecamatan Rantau Kopar yaitu masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang penguasaan *skill* komunikasi humas pemerintahan dan pemanfaatan teknologi komunikasi sebagai penunjang komunikasi humas pemerintahan bagi meningkatkan pelayanan publik.

Sehubungan dengan itu, Kecamatan Rantau Kopar dipilih sebagai mitra dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengupayakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

dalam bidang penguasaan *skill* komunikasi hubungan masyarakat (humas) pemerintahan berbasis teknologi komunikasi bagi aparat pemerintah kelurahan dan kepenghuluan sekecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir. Setelah kegiatan program pengabdian dijalankan, maka diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan para peserta mitra PKM tentang *skill* komunikasi hubungan masyarakat (humas) pemerintahan dan pemanfaatan teknologi komunikasi bagi aparat pemerintah kelurahan dan kepenghuluan sekecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 di Aula Kantor Camat, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kegiatan pengabdian diselenggarakan oleh tim PKM UIR bermitra dengan Pemerintah Kecamatan Rantau Kopar dengan tahapan sebagai berikut; Pertama, tahap persiapan, tim PkM berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Kecamatan Rantau Kopar guna membicarakan perihal kerja sama dalam program pengabdian kepada masyarakat. Setelah mendapat kesepakatan, maka tim PkM melakukan observasi dan analisis masalah prioritas yang dihadapi oleh mitra, mengkaji rancangan solusi-solusi masalah dan menentukan metode dan teknis pelaksanaan program PkM.

Kedua, pelaksanaan program PkM. Program pengabdian dijalankan dengan metode penyuluhan yang terdiri dari ceramah penyampaian materi dan tanya jawab. Peserta kegiatan berjumlah 25 orang aparatur pemerintahan dari perwakilan Kelurahan Rantau Kopar, Kelurahan Sungai Rangau, Kepenghuluan Bagan Cempedak, dan Kepenghuluan Sekapas, Kecamatan Rantau Kopar. Muatan materi penyuluhan adalah: (1) *Skill* komunikasi humas pemerintahan. (2) Penggunaan teknologi komunikasi untuk peningkatan kerja humas pemerintahan. Lebih rinci pada Tabel 3.

Tabel 3 Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Tahapan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksana / Narasumber	Waktu (WIB)
Pertama	Pembukaan acara	Camat Rantau Kopar	8.00 - 8.15
Kedua	Pelaksanaan 1. Penyampaian materi 2. Sesi tanya jawab dan diskusi	Tim PKM: Dr. Dafrizal Samsudin, M.Soc.Sc Hamsal, S.E., M.M. Al Sukri, M. I. Kom	8.15 -12.00
Ketiga	Penutupan dan foto bersama	Camat Rantau Kopar	12.00-12.30

Keempat, evaluasi kegiatan PkM, yaitu bertujuan untuk melihat hasil capaian pemahaman materi penyuluhan tim PKM di kalangan peserta mitra. Penilaian pemahaman terhadap capaian materi PKM berdasarkan hasil pengamatan tim pengabdian terhadap adanya partisipasi komunikasi interaktif antara narasumber dan peserta dalam proses sesi tanya jawab selama proses penyuluhan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh tim PKM Universitas Islam Riau (UIR) bekerja sama dengan mitra PKM yaitu pihak pemerintah Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tema “Pemberdayaan Komunikasi Kehumasan Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Komunikasi”. Pelaksanaan PKM bekerja sama antara tim PKM UIR dan Pemerintah Kecamatan Rantau Kopar berdasar kesepakatan kedua belah pihak yang diikat dengan surat pernyataan kerja sama tertanggal 14 Juni 2022.

Pada tahap persiapan kegiatan, tim PKM melakukan analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra PKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua isu masalah utama terkait dengan komunikasi humas layanan publik di lingkungan pemerintahan Kecamatan Rantau Kopar yaitu masalah *skill* komunikasi humas pemerintahan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam

praktik pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh April Manri sebagai Camat Rantau Kopar dalam diskusi dengan tim PKM di aula kantor Camat Rantau Kopar bahwa dalam melaksanakan pelayanan publik terutama di lingkungan pemerintahan tingkat kelurahan dan kepenghuluan di lingkungan Kecamatan Rantau Kopar masih belum maksimal jika dilihat dari sudut pandang komunikasi humas pemerintah karena didasari oleh keadaan sumber daya manusia yang tidak berlatar belakang pendidikan dalam bidang humas. Selanjutnya, isu keterbatasan penggunaan teknologi komunikasi bagi pendukung pelaksanaan komunikasi publik adalah salah satu masalah yang didapati dalam proses pelayanan publik yang dihadapi oleh aparatur pemerintahan di lingkungan Kecamatan Rantau Kopar, terutama di tingkat kelurahan dan kepenghuluan (April Manri, wawancara, 22 Juli 2022).

Selanjutnya, dua solusi ditawarkan bagi mengatasi masalah mitra PKM tersebut. Pertama, peningkatan *skill* komunikasi humas pemerintahan dalam konteks pengembangan kemampuan komunikasi interpersonal yang efektif baik secara verbal maupun nonverbal bagi kalangan aparatur pemerintahan kelurahan dan kepenghuluan di lingkungan kecamatan Rantau Kopar. Kedua, perlu upaya pembinaan dan peningkatan pemahaman aparatur pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi komunikasi sebagai sarana komunikasi humas pemerintahan seperti penggunaan media sosial untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan PKM terdiri dari sesi pembukaan, penyampaian materi, dan tanya-jawab. Kegiatan penyuluhan pengabdian diikuti oleh peserta mitra PKM yaitu sejumlah 25 orang aparatur pemerintahan terdiri dari perwakilan Kelurahan Rantau Kopar, Kelurahan Sungai Rantau, Kepenghuluan Bagan Cempedak, dan Kepenghuluan Sekapas, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kegiatan PKM dilaksanakan di Aula Kantor Camat Rantau Kopar pada hari Kamis, 25 Agustus 2022. Program PKM bertema “Pemberdayaan Komunikasi Kehumasan Pemerintahan Desa

Berbasis Teknologi Komunikasi”. Penyuluhan PKM dibuka secara resmi oleh Camat Rantau Kopar Bapak April Manri, S.Sos seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Penyuluhan

Sesi penyampaian materi disampaikan oleh dua orang narasumber dari tim PKM yaitu Dr. Dafrizal Samsudin, M.Soc.Sc bertema “Peningkatan *skill* SDM dalam bidang komunikasi humas pemerintahan berbasis nilai kearifan lokal”. Pemateri kedua adalah Al Sukri, M.I.Kom dengan tema “Penggunaan teknologi komunikasi dalam humas pemerintahan” (Gambar 2). Pemateri pertama menjelaskan upaya meningkatkan kesadaran warga untuk memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi. Pemerintah kelurahan dan kepenghuluan terlebih membuat sosialisasi secara persuasif terhadap warga dengan memerikan pemahaman tentang manfaat penggunaan media sosial yang digunakan oleh pemerintah sebagai saluran informasi penting tentang apa saja terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kelurahan dan kepenghuluan yang disampaikan melalui media sosial. Selain itu, pemerintah dapat juga melakukan penyuluhan teknis cara mengakses informasi. Pemateri kedua memaparkan tentang mengoptimalkan penggunaan media sosial bagi warga, maka perlu melakukan sosialisasi terhadap warga bahwa pemerintah akan menggunakan media sosial sebagai sarana media informasi program pemerintah, serta memberikan penyuluhan secara teknis andai kata menggunakan aplikasi media sendiri sebagai saluran informasi pemerintah.



Gambar 2 Penyampaian Materi Pada Peserta Penyuluhan

Setelah penyampaian materi oleh para pemateri, maka dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Gambar 3 menyajikan saat peserta bertanya kepada pemateri.



Gambar 3 Tanya Jawab Antara Pemateri dan Peserta Penyuluhan
Hasil Kegiatan

Berdasarkan pengamatan partisipatif tim PkM, secara kualitatif pelaksanaan kegiatan PKM dapat dinilai berjalan dengan baik dan memenuhi target capaian. Pertama, tim PKM UIR dapat menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah Kecamatan Rantau Kopar melaksanakan kegiatan penyuluhan humas pemerintahan dengan tema “Pemberdayaan Komunikasi Kehumasan Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Komunikasi”. Selanjutnya, tim PkM

berhasil mengungkapkan masalah prioritas mitra pengabdian yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan *skill* komunikasi humas pemerintahan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam praktik humas pemerintahan. Selain itu, tim PKM berhasil merumuskan solusi permasalahan mitra pengabdian tersebut yaitu melakukan penyuluhan tentang peningkatan *skill* sumber daya manusia bidang komunikasi humas pemerintahan dan penggunaan teknologi komunikasi media baru penunjang kerja humas pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kecamatan Rantau Kopar.

Kedua, pelaksanaan penyuluhan PkM. Proses penyuluhan dilakukan dengan metode penyampaian materi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta penyuluhan. Pengamatan tim PkM mendapati proses penyuluhan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Secara kualitatif, proses penyuluhan dikatakan berjalan sesuai target yang diharapkan yaitu tergambar dari terdapatnya interaksi partisipatif atau komunikasi interaktif antara narasumber dan peserta melalui proses tanya jawab dalam mempertajam pemahaman peserta pada setiap tema penyuluhan yang disampaikan narasumber. Misalnya, terjadi proses diskusi melalui komunikasi interaktif yang hangat antara narasumber dan peserta tentang pentingnya peran media sosial sebagai sarana saluran pesan program pemerintah kepada warga. Dalam proses diskusi tersebut juga menjelaskan perlu dilakukan sosialisasi penggunaan media sosial dan memberi bimbingan teknis kepada warga sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga tentang manfaat media sosial sebagai saluran informasi pemerintah. Selanjutnya, secara ringkas hasil kegiatan penyuluhan dapat dilihat seperti pada Tabel 4.

Tabel 4 Capaian Kegiatan Penyuluhan

Masalah Mitra Pengabdian	Solusi Tindakan Penyuluhan	Capaian Kualitatif Penyuluhan
Kurang penguasaan <i>skill</i> komunikasi humas pemerintahan	Penyuluhan peningkatan <i>skill</i> sumber daya manusia bidang komunikasi humas pemerintahan	Baik (terdapat interaksi partisipatif antara narasumber dan peserta)
Keterbatasan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam humas pemerintahan	Penyuluhan penggunaan teknologi komunikasi media baru penunjang kerja humas pemerintahan	Baik (terdapat interaksi partisipatif antara narasumber dan peserta)

Pada prinsipnya, pelaksanaan penyuluhan tentang optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai saluran komunikasi humas pemerintah tingkat kelurahan dan kepenghuluan di lingkungan pemerintah kecamatan Rantau Kopar merupakan salah satu bentuk terobosan inovatif untuk meningkatkan upaya layanan publik terhadap warga. Pemanfaatan media sosial oleh aparatur pemerintah dalam mendukung layanan publik telah juga dipraktikkan oleh pemerintah lainnya seperti pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah di lingkungan kabupaten/kota di Jawa Barat (Permasih, et.al. 2018; Nugraha, et.al. 2020), pemerintah kabupaten Asahan (Syafwan, et.al. 2021) dan pemerintah Kota Surabaya (Cahyani, 2020). Ini dapat juga dimaknai bahwa pelibatan media sosial sebagai bagian dalam praktik komunikasi humas pemerintah dalam proses peningkatan layanan publik merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi komunikasi.

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh tim PKM UIR bermitra dengan pemerintah Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada 25 Agustus 2022 di aula kantor Camat Rantau Kopar berjalan dengan lancar. Kegiatan pengabdian dijalankan dengan metode penyuluhan dengan yang dibuka oleh Camat Rantau Kopar, penyampaian materi oleh dua narasumber dari tim PKM UIR dan sesi tanya jawab dengan peserta. Dua

isu masalah utama yang dikupas dalam kegiatan PKM adalah tentang *skill* komunikasi humas pemerintahan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam meningkatkan layanan publik terkait dengan layanan informasi kebijakan atau program pemerintah kelurahan dan kepenghuluan menggunakan platform media sosial. Hasil kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa secara kualitatif terdapat proses pendalaman dan pemahaman materi penyuluhan bagi para peserta pengabdian yaitu para aparatur pemerintah kelurahan dan kepenghuluan di lingkungan pemerintah Kecamatan Rantau Kopar mengenai peran penting penguasaan *skill* komunikasi humas pemerintahan berbasis teknologi komunikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada DPPM UIR atas pendanaan kegiatan PKM dengan Kontrak Nomor: 172/KONTRAK/PKM-PT/DPPM-UIR/Jul-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan, D. (2019). Fungsi humas desa sebagai pengelola informasi di era keterbukaan informasi publik. *Jurnal Soshum Insentif*, 2 (2), 153-163.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021). *Kecamatan rantau kopar dalam angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir.
- Cahyani, A. M. (2020). Strategi komunikasi humas pemerintah kota surabaya dalam melayani dan menggali potensi masyarakat melalui media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10 (1), 1-16.
- Indonesia. (2015). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik*. Jakarta.
- Kabupaten Rokan Hilir. (2005). *Peraturan daerah kabupaten rokan hilir nomor 01 tahun 2005 tentang pembentukan kecamatan rantau kopar kabupaten rokan hilir*. Kabupaten Rokan Hilir: Bagansiapiapi
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2011). *Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI no. 28/2011 tentang pedoman umum komunikasi organisasi di lingkungan instansi pemerintah*. Jakarta.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.(2012) *Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. 83/ 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah*. Jakarta.
- Khotimah, N. K. (2021). *Pemanfaatan media sosial oleh praktisi humas pemerintah di Indonesia*. Jejak Pustaka.
- Lee, M., Neeley, G. and Stewart, K. (2012). *The practice of government public relations*. London: CRC Press.

- Maulvi, H. R., Rizal, E., & Lusiana, E. (2023). Peran media sosial bagi humas pemerintah. *Komunikasi: Jurnal Komunikasi*, 14 (1), 92-101.
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., Erdinaya, L. K., & Komariah, K. (2020). Komunikasi humas pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat melalui media digital Instagram. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 221-239.
- Permasih, I., Abidin, Y. Z., & Ma'arif, A. A. (2018). Pengelolaan media sosial instagram humas pemerintah provinsi jawa barat. *Reputation: Jurnal Hubungan Masyarakat*, 1(1), 25-46.
- Simatupang, O. (2020). Kompetensi humas pemerintah dalam menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 21(1). 85-100
- Syafwan, H., Putri, P., & Handayani, M. (2021). Peranan media sosial dan teknologi informasi dalam memajukan pembangunan daerah. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)*, 5(1), 29-34.